

Pembelajaran IPS Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Siswa SMK Farmasi Cendikia Farma Husada

Karsiwan, Pujiati, dan Rufaidah

FKIP Unila

Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, 35145

Telepon (0721) 704 947, Faks. (0721) 704 624

E-mail: karsiwan3@yahoo.co.id - HP. 08982263476

Abstract

Singer study aims to develop a learning process review IPS based on local wisdom values. The research activities conducted at SMK Farmasi Cendikia Farma Husada on Academic Year 2015-2016. The whole subject of research is the students of SMK X.A Class SMK Farmasi Cendikia Farma Husada as many as 46 students. Data collection techniques using observation and interviews. Research shows that IPS Learning Values-Based Local Wisdom Learning Ability to provide an alternative process is interesting, fun, and challenging for Students Simultaneously. IPS Learning Process Through Values-Based Local Wisdom Here, students are expected to able to develop ideas, creative thinking hearts well as scientific argumentation, through the learning process able putting students as actors learning.

Keywords: Learning Process, IPS, Local Wisdom

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan proses pembelajaran IPS dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Kegiatan penelitian dilaksanakan di SMK Farmasi Cendikia Farma Husada pada tahun ajaran 2015-2016. Subjek penelitian adalah seluruh siswa-siswi kelas X.A SMK Farmasi Cendikia sebanyak 46 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal mampu memberikan alternatif proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sekaligus menantang bagi siswa. Pembelajaran IPS dengan berpijak pada tema-tema kearifan lokal sangat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah. Melalui proses pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal inilah, siswa diharapkan mampu mengembangkan ide, gagasan, kreatifitas dalam berfikir serta berargumentasi ilmiah, melalui proses pembelajaran yang mampu menempatkan siswa sebagai pelaku pembelajaran.

Keywords: Proses Pembelajaran, IPS, Kearifan Lokal

Pendahuluan

Pendidikan adalah serangkaian upaya proses pemberian informasi yang diberikan kepada peserta didik, dan seringkali diartikan dan dimaknai secara beragam oleh setiap orang, bergantung pada sudut pandang masing-masing individu dan teori yang dipegangnya. Tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yakni: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran IPS sangat bergantung kepada kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi dan pengetahuan, serta relevansinya dengan kondisi kekinian yang berhubungan dengan kehidupan sosial siswa. Seorang guru harus mampu menciptakan proses belajar mengajar yang dialogis, sehingga mampu memberi peluang terselenggara proses belajar mengajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Melalui cara ini, peserta didik akan mampu memahami secara lebih mendalam, tidak hanya kemampuan menyebutkan atau menghapal materi pelajaran yang diukur melalui

hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud adalah terjadinya perubahan dan perbedaan dalam cara berpikir, merasakan, dan kemampuan untuk bertindak serta mendapat pengalaman dalam proses belajar mengajar yang telah dilalui.

Pembelajaran di era modern menuntut keaktifan siswa dalam proses belajar, sementara studi-studi di lapangan menunjukkan bahwa siswa lebih banyak belajar jika pelajarannya memiliki daya tarik, memuaskan, menantang, dan ramah serta mereka memiliki suara dalam pembuatan keputusan (De Porter, 2014: 54).

Pendidikan di era globalisasi dan informasi ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan agar siswa mampu memberdayakan dirinya untuk mene-mukan, menafsirkan, menilai dan menggunakan informasi yang diperoleh, serta mampu melahirkan gagasan kreatif untuk menentukan sikap dalam pengambilan keputusan. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), khususnya pada materi sejarah seringkali dianggap sebagai pelajaran yang bersifat hafalan dan membosankan untuk dipelajari. Pelajaran ini dianggap tidak lebih dari rangkaian angka, tahun, dan urutan peristiwa yang harus diingat kemudian diungkap kembali saat menjawab soal-soal dalam ujian. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, karena masih banyak terjadi paradigma berfikir guru yang keliru hingga saat ini. Pelajaran IPS pada materi sejarah yang selama ini terjadi

di sekolah-sekolah dirasakan kering dan membosankan karena kurang bervariasinya metode yang digunakan selama pembelajaran karena kecenderungan siswa hanya menerima pengetahuan tanpa melakukan analisis kritis sehingga pengalaman belajar yang didapatkan hanya sekedar pengetahuan (hapalan) saja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia umumnya (Kartodirjo, 1999: 29; Supardan, 2015: 77 ; Uno, 2013: 106).

Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan mengingat karakter dan kepribadian siswa dapat dibentuk salah satunya melalui materi pelajaran sejarah. Materi sejarah mampu memberikan sumber inspirasi dan aspirasi pada diri peserta didik tentang nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan, dan pengorbanan untuk bangsa dan negaranya. Namun hingga saat ini masih terus dipertanyakan keberhasilan tujuan pembelajaran sejarah di sekolah. Hal ini mengingat fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia khususnya generasi muda makin hari makin jauh dari nilai-nilai sosial dan pengorbanan, sehingga generasi saat ini diragukan eksistensinya. Dengan kenyataan tersebut artinya ada sesuatu yang harus dibenahi dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah.

Pelajaran IPS pada materi sejarah yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah dirasakan kering dan membosankan. Kurang bervariasinya metode yang digunakan selama pembelajaran membuat siswa cenderung hanya menerima pengetahuan tanpa melakukan analisis kritis, sehingga pengalaman belajar yang didapatkan hanya sekedar pengetahuan (hapalan) saja. Hal ini berdampak pada minat belajar siswa kelas X yang rendah. Kondisi ini tentunya berdampak pula terhadap hasil belajar siswa kelas X pada ujian tengah semester ganjil (UTS) di SMK Farmasi Cendikia Farma Husada Bandar Lampung masih rendah, dan sebagian besar harus dilakukan perbaikan (remedial) untuk mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Berikut adalah hasil belajar siswa kelas X berdasarkan hasil ujian tengah semester yang telah dilaksanakan di semester Ganjil tahun 2015.

Tabel . Hasil UTS Siswa kelas X.A

No	Kriteria Nilai	Jenis Kelamin				Total	
		Lk		Pr		f	%
		F	%	F	%		
1.	> 75	4	44	14	36,8	18	38,2
2.	< 75	5	56	24	63,15	29	61,7
Jumlah		9	100	38	100	47	100

Sumber: Analisis Hasil Nilai UTS Siswa (2015)

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa pada aspek kemampuan kognitif siswa masih sangat rendah. Terdapat 18 siswa dari jumlah siswa di Kelas X sebanyak 47 yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah yakni 75. Banyak faktor yang diduga melatar-belakangi bagaimana kemampuan kognitif siswa Kelas X masih rendah seperti jumlah siswa perkelas yang dirasa tidak ideal (terlalu gemuk), metode dan cara mengajar yang digunakan selama ini mungkin belum mampu memfasilitasi kemampuan kognitif siswa serta faktor lain yang mempengaruhi siswa seperti pengalamanan belajar peserta didik pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) hingga K-13 saat ini telah mengakomodir perlunya pengkajian terhadap kondisi dan potensi masing-masing daerah untuk dikembangkan dan

dikombinasikan dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang unik dan menarik untuk digali lebih jauh. Namun nilai-nilai kearifan lokal yang ada hendaknya disesuaikan dengan materi pelajaran, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Penambahan materi pelajaran dilaku-kan dengan tetap memperhatikan bahwa materi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, kemam-puan, minat dan kebutuhannya serta dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada disekitar peserta didik.

Menurut Suryo yang dimuat dalam harian Kompas (2015, 12) menyatakan bahwa “pembaruan metode itu, seorang guru memiliki peran yang dominan di dalamnya. Setidaknya terdapat tiga hal utama dan penting dalam pembaharuan metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru yakni, (1) mendorong agar pemahaman sejarah bukan hanya pengetahuan fakta atau peristiwa, (2) metode pengajaran yang mampu mengangkat nilai penting seperti nilai moral dan kebangsaan, (3) menjadikan sejarah sebagai pijakan pengalaman dan belajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran berikutnya (*lesson learn*)”. Pembelajaran IPS sudah seharusnya diajarkan dengan cara yang kreatif seperti bermain peran, menggunakan permainan, keaktifan yang menyenangkan, dan menantang

sehingga pelajaran IPS tidak lagi dianggap pelajaran kelas dua yang membosankan, sekedar hapalan dan juga penuh dengan cerita-cerita.

Kebijakan dan implementasi pendidikan dengan berwawasan kearifan lokal di sekolah menjadi sangat penting dan strategis dalam pengembangan karakter siswa, menurut Asriati (2012:1) dalam penelitiannya menyatakan bahwa "Pendidikan Karakter berbasis kearifan lokal dalam rangka membangun bangsa sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber nilai-nilai yang luhur. Kearifan lokal merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya". Kondisi lain yang mendasari dan mendukung pentingnya inovasi pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal ialah relevansi dan keterkaitan proses pembelajaran peserta didik dengan kondisi realitas sosial peserta didik dalam hidup dan kehidupan sosialnya. Mengingat belajar merupakan pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru ketika seseorang berinteraksi dengan informasi dan lingkungan (Smaldino, 2011:11). Dengan demikian, sudah seharusnya proses pendidikan yang dilakukan senantiasa melibatkan interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan pendidik, dan tentunya interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya.

Nilai kearifan lokal yang digunakan dalam proses

pembelajaran dapat berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal (Sibarani, 2012: 118). Terintegrasinya kearifan lokal daerah dalam dimensi pendidikan IPS akan semakin menguatkan karakter siswa dalam proses pembelajaran di sekolah, memasyarakatkan nilai-nilai kearifan lokal pada proses pembelajaran, dan tentunya sesuai dengan lingkungan yang ada dan merupakan kejadian yang dialami peserta didik dalam rangka mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata di sekitar mereka sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran IPS akan lebih menguatkan kemampuan keterampilan sosial siswa untuk bertanya, memahami, dan tentunya menyikapi setiap persoalan akan lebih terasa apabila proses pembelajaran siswa bermakna dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terlebih terdapat beberapa peristiwa, potensi, dan situs-situs sejarah baik yang diketahui maupun tidak, ada yang tidak terawat dan sebagian bahkan mulai hilang ditelan zaman.

Menurut Sapriya, (2012: 15) PIPS di Indonesia baru diperkenalkan di tingkat sekolah pada awal tahun 1970-an kini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang *Social Studies* di Negara-negara maju dan tingkat permasalahan sosial yang semakin

kompleks. Lima tradisi *Social Studies*, yaitu : (1). *Social Studies as citizenship transmission*; (2) *Social Studies as Social Sciences*; (3). *Social Studies as Reflective Inquiry*; (4). *It will involve three clusters of objectives*; (5). *Atitudes and values*. Supardan (2015: 17) menyatakan bahwa yang dimaksud pelajaran IPS adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk membantu dan melatih anak didik, agar mampu memiliki kemampuan untuk mengenal dan menganalisis suatu persoalan dari berbagai sudut pandang secara komperhensip. Dengan demikian kajian IPS selalu seiring dan sejalan dengan perkembangan manusia sebagai objek kajian ilmu sosial. Diantara ketiga tradisi sosial diatas yang masuk dalam kajian pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Lampung terlihat pada poin ke tiga yaitu IPS sebagai penelitian mendalam (*Social Studies as Reflective Inquiry*). Pembelajaran merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kompetensi, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran selalu dilakukan tanpa henti. Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai sebuah sistem dengan komponen-komponen yang saling berinterfungsi satu sama lain.

Potensi kearifan lokal yang ada di Lampung baik dalam bentuk peristiwa, cerita maupun benda-benda peninggalan yang masih bisa

kita temukan di lapangan dan digunakan sebagai alternatif sumber materi belajar. Dengan demikian akan muncul semangat, dan antusias siswa dalam mempelajari dan mengkaji materi sejarah, yang dengannya diharapkan mampu menjadikan materi sejarah menjadi lebih hidup, menarik dan menantang untuk dikaji dan pelajari oleh setiap peserta didik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengembangan bahan ajar ips berbasis nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan minat belajar siswa?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di SMK Farmasi Cendikia Farma Husada kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Pemilihan terhadap lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yakni memilih secara sengaja dengan maksud mendapatkan sebuah lokasi yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa kelas X dengan pertimbangan merupakan siswa dengan karakteristik yang berbeda dari asal sekolah yang berbeda daripada kelas XI, sedangkan kelas XII sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan subjek penelitian karena mereka sudah terkonsentrasi untuk segera meninggalkan sekolah di jenjang

SMK untuk bersekolah di jenjang yang lebih tinggi. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016.

Penelitian ini dilakukan melalui suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan suatu proses pembelajaran IPS dengan mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di lingkungan peserta didik sebagai objek pembelajaran, pengembangan proses pembelajaran yang terfokus dengan nilai-nilai kearifan lokal sendiri dilakukan melalui rangkaian kegiatan analisis-aksi-refleksi-evaluasi dan inovasi dalam suatu tahapan penelitian yang terencana, terukur, dan sistematis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh berupa kasus-kasus, fenomena-fenomena dan argumen-argumen sehingga memerlukan pemikiran yang teliti dan mendalam dalam menyelesaikan masalah penelitian. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan.

Menurut Miles dan Huberman, tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif, meliputi :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan kemudian akan dituangkan dalam bentuk laporan. Proses selanjutnya adalah mengubah rekaman data ke dalam pola, kategori dan disusun secara sistematis. Proses pemilihan, pemusatan perhatian,

pengabstrakan dan transpormasi data dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian berlangsung. Fungsi dari reduksi data ini adalah untuk menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga interpretasi bisa dilakukan dengan mudah.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penampilan data sekumpulan data yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dari pengambilan tindakan.

Bentuk penyajiannya antara lain dengan cara memasukkan data ke dalam sejumlah matrik, grafik dan bagan yang diinginkan atau bisa juga hanya dalam bentuk naratif saja.

3. Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi

Setelah data direduksi, akan dimasukan ke dalam bentuk bagan, matrik dan grafik, maka tindak lanjut peneliti adalah mencari konfigurasi yang mungkin menjelaskan alur sebab akibat dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung (Miles dan Huberman, 1992: 28).

Hasil dan Pembahasan

a. Pembelajaran IPS di SMK

Proses pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal merupakan

pembelajaran yang akan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran (student centered). Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa belajar tidak sekedar kegiatan pasif menerima transfer pengetahuan dari guru, melainkan proses aktif menggali, mencari dan menemukan pengalaman baru serta mengasimilasi dan menghubungkan antar komponen yang ada dalam pembelajaran sehingga pembelajaran mampu memberikan makna bagi diri peserta didik. Bagi guru, mengajar adalah kegiatan memfasilitasi siswa dalam proses mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui keterlibatan aktif dalam kehidupan sehari-hari (Sudjana, 2013: 76).

Pembelajaran IPS dengan berpijak pada tema-tema kearifan lokal sangat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah, dan dengannya diharapkan mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal berinteraksi, berkomunikasi, baik di sekolah maupun di masyarakat serta mampu memaparkan konsep dan menganalisis isi materi pembelajaran serta menemukan benang merah antara materi pelajaran dengan bukti-bukti kebendaan bernilai sejarah yang ada di masyarakat. Pendekatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan terpadu sesuai dengan materi IPS yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, dan memaparkan hasil-hasil kegiatan di lapangan yang telah ditemukan.

Tradisi keilmuan IPS dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dapat dilihat pada tradisi ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembangan pribadi individu. Pengembangan pribadi individu seseorang memang tidak langsung tampak hasilnya tetapi setidaknya melalui pendidikan IPS akan membekali kemampuan seseorang dalam pengembangan diri melalui berbagai keterampilan sosial dalam kehidupannya. Mengembangkan kemampuan berpikir historis (historical thinking) peserta didik melalui kajian fakta dan peristiwa sejarah secara langsung, dan dikaitkan dengan berbagai sumber yang tersedia baik buku, tokoh maupun sumber internet, serta diharapkan mampu menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau pada umumnya, dan di wilayah Lampung pada khususnya. "Pendidikan IPS disini harus membekali siswa tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sehingga semua itu dapat membentuk citra diri siswa menjadi manusia yang memiliki jati diri yang mampu hidup ditengah masyarakat

dengan damai dan dapat menjadikan contoh teladan serta memberikan kelebihanannya pada orang lain.

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal (Keraf, 2010: 369) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang terjadi baik antar sesama manusia maupun manusia dan lingkungan, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Yang Gaib.

Kearifan Lokal diartikan Apriyanto (2008: 4), sebagai segala sesuatu ataupun berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Termasuk berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, bertingkah laku dan bertindak yang dituangkan sebagai suatu tatanan sosial.

Sibarani (2012: 112-113) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Sehingga mampu memberikan sumbangsih kepada kehidupan masyarakatnya. Kearifan lokal itu mungkin berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai sebuah keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi yang terdapat pada lingkungan masyarakat. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu dan secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup masyarakatnya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Meskipun nilai-nilai yang ada bersifat lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Pengertian ini memandang kearifan lokal tidak hanya sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang dalam bermasyarakat tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh dengan keluhuran budi dan keadaban.

c. Urgensi Pembelajaran IPS Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal merupakan proses pembelajaran yang berpijak pada keyakinan bahwa siswa adalah pelaku utama proses belajar. Proses pembelajaran yang terjadi berangkat dari prinsip belajar yang dialogis, humanis, kritis, menyenangkan sekaligus menantang bagi siswa. Pembelajaran IPS dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajarannya di sekolah dirasa sangatlah tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS yaitu “agar siswa mampu mengembangkan gagasan, wawasan, pemahaman, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di kehidupan siswa, sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya” (Supardan, 2015: 17). Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam mata pelajaran IPS, sehingga materi IPS akan semakin kaya, menjadi lebih hidup, bermakna, dan menantang bagi peserta didik untuk digali, dipelajari dan dimaknai sebagai sebuah proses belajar yang mendewasakan..

Pembelajaran IPS yang berbasis kearifan lokal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai bentuk kearifan lokal yang ada di lingkungan peserta didik kedalam mata pelajaran IPS dengan tujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal di daerah setempat

pada mata pelajaran IPS, sehingga diharapkan siswa menyadari akan keberadaan dan pentingnya nilai-nilai tersebut dan menginternalisasikan nilai-nilai itu ke dalam tingkah lakunya sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung didalam maupun diluar kelas. Terdapat lima dimensi kultural tentang kearifan lokal, yaitu (1) pengetahuan lokal, yaitu informasi dan data tentang karakter keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi masalah serta solusinya. Hal ini akan nampak pada tataran ide dan gagasan kelompok masyarakat tentang wawasan daerahnya. Pengetahuan lokal penting untuk diketahui sebagai dimensi kearifan lokal sehingga diketahui derajat keunikan pengetahuan yang dikuasai oleh masyarakat setempat untuk menghasilkan inisiasi lokal; (2) budaya lokal, yaitu yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang telah terpola sebagai tradisi lokal yang berlangsung secara terus-menerus, yang meliputi sistem nilai, bahasa, tradisi, teknologi; (3) keterampilan lokal, yaitu keahlian dan kemampuan masyarakat setempat untuk menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki, hal ini akan terlihat pada aktifitas dan pola pekerjaan masyarakatnya; (4) sumber lokal, yaitu sumber yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan fungsi-fungsi utamanya; dan (5) proses sosial lokal,

berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat dalam menjalankan fungsi- fungsinya, sistem tindakan sosial yang dilakukan, tata hubungan sosial serta kontrol sosial yang ada. Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal adalah langkah nyata upaya menjembatani jurang antara pembelajaran IPS khususnya pada materi sejarah dengan kondisi kekinian peserta didik di era globalisasi, dengan harapan mampu meningkatkan minat dan karakter peserta didik dalam menggali, memahami, mengopti-malkan, dan mengembangkan potensi kearifan lokal yang mulai dilupakan dan ditinggalkan. Bentuk integrasi nilai-nilai kearifan lokal di Lampung dengan materi pelajaran IPS di sekolah dapat dilihat pada tabel 2.

Melalui proses pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal inilah, siswa diharapkan mampu mengembangkan ide, gagasan, kreatifitas dalam berfikir serta beragumentasi ilmiah, melalui proses pembelajaran yang mampu menempatkan siswa sebagai pelaku pembelajaran. Proses pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal diharapkan mampu; a) mendorong siswa untuk berinisiatif mengembangkan pola pikirnya selama pembelajaran dengan data-data yang siswa temukan dalam pembelajaran baik didalam kelas maupun diluar kelas, b) memberikan keleluasaan kepada siswa untuk melakukan kegiatan eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal di Lampung dalam kaitannya dengan materi kedatangan

bangsa Barat di Indonesia, c) mengembangkan proses pembelajaran yang dialogis antara guru-siswa dan antara siswa-siswa mengenai pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal, d) mendorong siswa untuk melakukan analisis kritis terhadap materi pelajaran, fakta-fakta di lapangan dan konstruksi pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah dalam kaitannya dengan kehidupan diluar sekolah.

Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal diharapkan mampu menjembatani materi pelajaran, antara teori di sekolah dengan fakta-fakat yang ada di lapangan yang ditemukan sendiri oleh siswa di masyarakat. Selain itu pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal dapat mengurangi tingkat kejenuhan siswa dalam pembelajaran, serta memudahkan siswa dalam mengingat materi karena siswa mengalami langsung, sehingga Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal mampu secara efektif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran IPS baik dari aspek inovasi pembelajaran, kreativitas, dan suasana pembelajaran yang dirancang menyenangkan sekaligus menantang bagi siswa. Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal disesuaikan dengan materi di sekolah. Kelebihan yang dimiliki dalam pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal ialah mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, bahan ajar IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal dapat dipakai dalam setiap mata pelajaran apapun

yang berbasis pada potensi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, pembelajaran yang dilakukan melalui nilai-nilai kearifan lokal mudah untuk diingat karena siswa langsung bisa melakukan dan mempraktikkan teori yang di dapat dengan kenyataan yang ada.

Daftar Pustaka

- Apriyanto, Y. dkk. 2008. *Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan*. Makalah Pada PKM IPB, Bogor.
- Asriati, Nuraini. 2012. *Pengembangkan Karakter Peserta Didik Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pembelajaran Di Sekolah*. Dikutip dari jurnal unta Vol 3, No 2 (2012) <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/3663>. di unduh pada 17 Oktober 2015 pukul 13.45
- Deporter, Bobbi, Readorn Mark & Nourie, Sarah Singer. 2014. *Quantum Teaching*. Terj. Ary Nilandari. Bandung: Kaifa
- Kartodirjo, Sartono. 1999. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia
- Keraf, A.S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Koentjaraningrat.1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta.
- Miles, Mathew G. dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sapriya. 2012. *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Rosdakarya
- Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Smaldino, Sharon E, Dkk. 2008. *Instructional Teknologi And Media For Learning, Ninth Edition*. Terj. Arif Rahman. Jakarta: Kencana
- Sudjana, Nana. 2013. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Supardan, Dadang. 2015. *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial; Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suryo, Djoko. 2012. *Pembelajaran Sejarah di Sekolah*. Jakarta: Harian KOMPAS
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Uno, Hamzah B dan Lamatenggo, Nina. 2013. *Landasan Pendidikan: Sebuah Pemikiran Komprehensif Landasan Pendidikan Berbasis Karakter di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publish.

Zainal Abidin Alting (Sultan Tidore) dalam Perjuangan Irian Barat 1946-1965

Rustam Hasyim

Program Doktor, Jurusan Ilmu Sejarah, FIB UGM, Yogyakarta
Staf Pengajar Universitas Khairun Ternate

Abstrak

Hubungan antara Maluku (Ternate, Bacan dan lebih khususnya lagi Tidore) dengan Papua sudah terjalin jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Hubungan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan bukan hanya dibuktikan dengan sumber-sumber tertulis, tetapi melalui cerita-cerita rakyat yang berasal dari Maluku (Kronik Tidore dan Bacan) dan Papua (Kronik Biak) yang mengisahkan ikatan persaudaraan itu. Ikatan persaudaraan selama berabad-abad ini membentuk ingatan kolektif dan secara sengaja dihilangkan oleh Kolonial Belanda dengan memisahkan Tidore dengan Papua dalam Konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946, menimbulkan protes dari Zainal Abidin Alting (Sultan Tidore).

Pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk memisahkan Papua dari wilayah Indonesia Timur, melalui Konferensi Denpasar mendapat protes keras oleh utusan Maluku Utara Zainal Abidin Alting, Sultan Tidore. Zainal Abdin menyatakan bahwa dari dahulu kala wilayah Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Tidore. Pemisahan Papua dari Negara Indonesia Timur juga bertentangan dengan keputusan konferensi Malino. Perjuangannya memperjuangkan pembebasan Irian Barat, kini Papua, mengantarkan dirinya ke pelantikan sebagai gubernur pertama Papua oleh Presiden Soekarno pada 23 September 1956.

Kata Kunci: Zainal Abidin Alting, Sejarah, Politik, Papua, Indonesia

Pengantar

Sejarah yang menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah atau bagian dari Kesultanan Tidore dapat ditemukan dalam berbagai sumber sejarah baik lisan maupun tulisan. Dalam cerita rakyat Tidore dikisahkan bahwa sejak abad XV Sultan Tidore mengangkat pejabat daerah di Biak dengan gelar Kapitan, Mayor, Sangaji, dan Dimara. Salah seorang tokoh Biak bernama Gurabesi¹ diangkat sebagai pejabat di pusat istana Tidore dan dinikahkan dengan salah satu putri Sultan. Gurabesi inilah yang kemudian melahirkan penguasa-penguasa di kepulauan Raja Ampat.

Begitu pula dalam catatan tertulis dapat ditemukan dalam mesium Kesultanan Tidore, Sinyine Mallige, mengemukakan bahwa pada tahun 1453, Ibnu Mansur (Sultan Tidore ke-10) bersama Sangaji Patani dan Kapita Waigeo melakukan ekspedisi dengan satu armada kora-kora ke Papua. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Papua bagian barat seperti wilayah Raja Ampat

(kolano ngaruha), Papoua Gamsio (Sembilan negeri), dan wilayah mafor Soa Raha (empat soa/marga). Wilayah-wilayah inilah kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Tidore². Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan kepala daerah tertentu dengan pangkat dan atribut seperti Kapitan, Mayor, Sangaji, Dimara, dan sebagainya. Menurut F.C. Kama bahwa apabila orang Biak datang membayar upeti maka mereka menghadiahi sebuah gelar. Gelar yang berasal dari Tidore, seperti Sangaji pada masa itu dilakukan oleh Sultan Tidore dengan suatu surat keputusan sultan (*besluit*)³. Pada saat yang sama, penduduk setempat diwajibkan menyerahkan upeti ke Kadaton Kesultanan Tidore.

Fakta tersebut menunjukkan begitu eratnya hubungan Kesultanan Tidore dengan Papua. Bahkan pemberian

¹ Sebagai balas jasanya, Sultan Tidore menyediakan sebuah kampung yang khusus dihuni oleh masyarakat Papua yang bernama Gurabati.

² Penguasaan atas Papua bukan hanya dilakukan oleh Kesultanan Tidore. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Waigama dan Misool pernah menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh adik sultan Bacan yang bernama Kaicil Jelman pada tahun 1512 merupakan penguasa Islam pertama di Papua. Selain Kesultanan Bacan, Ternate juga menguasai wilayah Papua terutama daerah Salawati. Lihat Wawan H. Purwanto, Papua 100 Tahun ke Depan, (Jakarta: CMB Press, 2010), hlm. 33.

³ Wawan H. Purwanto, Papua 100 Tahun ke Depan, (Jakarta: CMB Press, 2010), hlm. 5.

penggunaan nama Papua menurut cerita lisan berasal dari bahasa Tidore, bahwa kata Papua memiliki beberapa arti. Pertama, Papua berarti rambut keriting. Kedua, Papua memiliki arti tidak berpapak atau daerah yang tidak bertuan. Dengan diterimanya penggunaan nama Papua oleh masyarakat Indonesia dan sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Tidore, maka pada Konferensi Malino di Makasar 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Papua menentang penggunaan nama Papua dengan mengatakan “De heer Kasiepo ziede, dat. De band van het landschap Tidore met Nieuw-Guinea dient te worden verbroken. De naam Papoea moet worden afgeschaft, amdat dit word het Tidoreesch slaaf beteeken. Het volk wenscht het land Nieuw-Guinea te noemen en het volk Irian⁴”. Nama yang di usulkan ialah Irian. Pengusulan nama Irian ini oleh Frans Kaisepo memiliki tendensi politik⁵. Dalam

perkembangannya nama Irian inilah di era Pemerintahan Soekarno secara resmi digunakan sejak 1 Mei 1963 dengan sebutan Irian Barat. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya 1 Maret tahun 1973, nama ini diganti menjadi Irian Jaya pada era pemerintahan Soeharto. Memasuki era Reformasi penggunaan nama Papua kembali disuarakan ketika masyarakat menuntut nama Irian Jaya kembali diganti menjadi Papua. Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Abdurahman Wahid dan mengganti Irian Jaya menjadi Papua pada tanggal 1 Januari 2000⁶.

Belanda), karena dianggap pro Belanda, maka dalam konferensi Malino ia diutus untuk menggantikan Silas Papare (Serui) yang memiliki sikap keras terhadap pemerintah Belanda. Baca Wawan H. Purwanto, Papua 100 Tahun ke Depan, (Jakarta: CMB Press, 2010), hlm, 5.

⁴ Notulen Konferensi Malino “ Kort Verslag van de Vergadering van de Malino conferentie op 18 Juli 1946” dalam S.L. van der Wal (ed.), Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlands Indonésische Betrekkingen 1945-1950, deel 5, 16 Juli-28 Oktober 1946.

⁵ Frans Kaisepo adalah seorang pribumi asli Papua dari Biak diangkat Pemerintah Kolonial Belanda menjadi pegawai *binnenlandsch bestuur* (administrasi sipil

⁶Sebelum konferensi Malino diselenggarakan di Makasar, daerah Irian Jaya dinamakan daerah Papua. Nama Irian kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka propaganda politik melawan pemerintah kolonial Belanda. Begitu banyaknya pergantian nama Papua, kemudian menjadi Irian dan menjadi Irian Jaya, dan kembali menjadi papua, maka untuk memudahkan penulis dalam membahas masalah ini, maka penulis menggunakan nama Papua sebagai entitas budaya dan politik.

Masalah Papua dalam Konferensi Malino dan Denpasar

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda termasuk Papua merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, pihak Belanda menganggap Papua menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Dalam usahanya untuk tetap menguasai Papua Gubernur Jenderal van Mook, mengusulkan kepada pemerintah Belanda di Den Haag agar kepadanya diberi izin mengadakan suatu konferensi pemimpin-pemimpin politik dari daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan restu yang diperoleh dari Pemerintah Belanda, maka van Mook menyelenggarakan Konferensi Malino pada 16-24 Juli 1946⁷. Tujuan diadakannya Kon-

ferensi Malino adalah untuk memper-tahankan eksistensi dan kepentingan pemerintahan kolonial Belanda dikawasan Timur Indonesia dengan wadah negara federal, sebagaimana diinginkan Van Mook.

Konferensi Malino menurut Tarmidzy Thamrin merupakan awal diletakkannya dasar-dasar pemecahan wilayah Indonesia ke dalam daerah-daerah berdiri sendiri sebagai negara bagian dari suatu negara federal dan memberikan kemungkinan kepada pihak Belanda untuk memisahkan daerah Papua dari Indonesia⁸. Pada saat yang bersamaan pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan keputusan (Staatsblad, No. 69, 15 Juli 1946), bahwa seluruh daerah Papua dinyatakan sebagai suatu karesidenan tersendiri, dan diangkat J.P.K. van Eechoud sebagai residen pertama. Pembentukan karesidenan mandiri dan terlepas

⁷ Malino adalah sebuah tempat di Sulawesi Selatan yang terletak 70 km dari Makasar. Kata Malino (bahasa Bugis) "tempat yang damai". Suatu tempat peristirahatan yang dulu ditahun 1932 dibangun oleh Gubernur J. Caron yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi. Konferensi Malino diadakan di Malino Sulawesi Selatan, daerah yang menghubungkan wilayah Timur Besar (Indonesia Timur) dengan Kalimantan dilihat dari sudut politis, ekonomis maupun geografis. Kota Makassar adalah pusat

kehidupan ekonomis di wilayah bagian Timur Indonesia dan merupakan suatu bandar besar, sekaligus merupakan pusat lalu lintas samudera di bagian Timur Kepulauan Indonesia. Lebih jelasnya baca Ide Anak Agung Gde Agung, Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat. (Yogyakarta: UGM Press, 1985), hlm. 96.

⁸ Tarmidzy Thamrin, Boven Digoel Lambang Perlawanan Terhadap Kolonialisme. (Surabaya: Cottage, 2001), hlm 119-200.

dari Karesiden Maluku sebagai strategi agar tetap menguasai Papua.

Sesuai kesepakatan Konperensi Malino bahwa Konperensi kedua (sebagai kelanjutannya) akan diadakan kurang lebih empat bulan di Denpasar. Konferensi Malino yang diikuti oleh 71 perwakilan dari seluruh daerah Indonesia Timur, kebanyakan diwakili oleh Raja ataupun Sultannya, yang kesemuanya merupakan boneka Belanda⁹. Sementara dari pihak Papua sengaja tidak diundang Frans Kaisepo untuk mewakili penduduk pribumi. Hal ini dimaksudkan untuk memuluskan rencana pemerintah kolonial Belanda memisahkan Papua dari Indonesia agar tidak mendapat rintangan dari masyarakat Papua.

Zainal Abidin Alting dan

Penolakan Konperensi

Denpasar

Satu hal yang menjadi permasalahan krusial dalam

⁹ Jumlah utusan-utusan daerah yang dipilih oleh masing masing daerah ditetapkan oleh Letnan Gubernur Jenderal yang terdiri dari 55 utusan daerah dan tambah 15 utusan dari golongan minoritas (Cina dan Timur Asing lainnya) sehingga berjumlah 71 orang peserta orang Indonesia dan 5 orang Belanda dalam konperensi Denpasar.

konferensi tersebut adalah mengenai rancangan perumusan pembentukan Negara Indonesia Timur. Pemisahan Papua dari Negara Indonesia Timur yakni pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Daerah negara timur besar meliputi daerah gewest yang diadakan menurut ordononnantie tanggal 19 Pebruari 1936 (Staatsblad no. 68). Besluit Gubernemen tanggal 25 Mei 1938 no.28, (Staatsblad no. 264). Tetapi tentang daerah Karesidenan Nieuw Guinea kemudian akan diambil keputusan ke mana daerah tersebut dimasukkan"¹⁰. Pasal 1 ayat 2 inilah kemudian menjadi perdebatan dan keberatan oleh Zainal Abidin atas pemisahan Irian Barat dari Negara Indonesia Timur. Penolakan yang sama juga dilakukan oleh wakil-wakil daerah lainnya seperti; I Goesti Bagoes Oka (Bali), E. Katoppo (Minahasa), Nadjamoedin Daeng dan Tadjoeidin Noer dari Sulawesi Selatan. Dengan demikian, untuk menghindari perdebatan yang panjang mengenai status Irian Barat dalam ketatanegaraan Indonesia Timur, Zainal Abidin mengusulkan pasal 15 ayat 13

¹⁰ Tarmidzy Thamrin, Boven Digoel Lambang Perlawanan Terhadap Kolonialisme. (Surabaya: Cottage, 2001), hlm 119-200.

bahwa “Daerah Maluku Utara, terdiri dari daerah swapraja Ternate, Tidore dan Bacan yang bersama terikat sebagai suatu federasi termasuk Irian Barat sesudah kata Tidore”. Namun usul ini ditolak oleh peserta lainnya, dengan tidak disebut Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Indonesia Timur, memberi kesempatan pada pihak Belanda untuk menganggap daerah Irian Barat bagian dari daerah koloni barunya yang terpisah dari Indonesia.

Walaupun sebagean besar peserta delegasi menolak pemisahan Papua dari Negara Indonesia Timur, namun akhirnya mereka dapat menyetujui hasil persetujuan Konperensi Meja Bundar dan naskah Rencana Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Memang banyak pertanyaan diajukan Zainal Abidin kepada pemerintah Belanda mengenai pokok dan hakekat persetujuan yang telah dicapai itu, dan pemerintah diminta memberi penjelasan¹¹.

Kendati hampir semua anggota menyatakan penyesalannya bahwa masalah Irian Barat masih merupakan suatu sengketa. Namun para anggota dapat meyakini bahwa

Delegasi Negara Indonesia Timur sudah berjuang secara maksimal untuk menghindarkan terpisahnya wilayah Irian Barat dari penyerahan kedaulatan dan oleh karena perkembangan keadaan tidak berhasil dalam perjuangan itu¹².

Oleh karena tidak dimasukan Papua dalam rumusan batas wilayah mengenai masalah Irian Barat, maka Zainal A. Alting tidak dapat menyetujui Piagam Penyerahan Kedaulatan. Dengan demikian hanya seorang anggota dari Maluku Utara Zainal A. Alting (Sultan Tidore) tidak dapat menerima terpisahnya Irian Barat dari wilayah Republik Indonesia Serikat dan menolak rumusan kompromi mengenai masalah itu sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 piagam penyerahan kedaulatan. Zainal A. Alting menyatakan bahwa dari dahulu kala wilayah Irian Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Tidore dan oleh karena itu swapraja ini mempunyai hak sepenuhnya dan syah terhadap wilayah Irian Barat¹³. Menurut pendapatnya jika kemudian

¹² Indonesia Timoer. (Makasar, 27 Desember 1947)

¹³ Soeloeh Rakyat. (Makasar, 13 Januari 1947)

¹¹ L. Katoppo, op,cit, hlm. 72.

diadakan penyelesaian mengenai masalah sengketa Irian Barat ini, hak sah Kesultanan Tidore sebagai dimaksudkan di depan harus diakui.

Pada tanggal 28 November 1949 Perdana Menteri Anak Agung menyampaikan jawaban atas pemerintah mengenai Papua di hadapan para anggota parlemen NIT dalam hubungan ini Anak Agung mengemukakan bahwa:

”Pendirian Delegasi Negara Indonesia Timur dalam Konperensi Meja Bundar tentang hal ini sama sekali sesuai dengan pendirian pemerintah yang saya anggap sudah cukup diketahui. Juga bagaimana delegasi dengan segala kekuatan mencoba mendapatkan hasil yang lain, yaitu agar Irian Barat pada penyerahan kedaulatan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Maka pemerintah sangat menyesal bahwa hasil yang diinginkan itu tidak dapat dicapai dan bahwa masalah Irian Barat masih harus menjadi pokok sengketa dengan Negeri Belanda. Untuk menjawab pertanyaan

Sultan Tidore tentang kedudukan Irian Barat di kemudian hari, pada dewasa ini masih **prematur** (terlalu dini) untuk membahasnya dalam hubungan pembicaraan mengenai hasil-hasil Konperensi Meja Bundar. Tentunya yang menjadi soal ialah, apakah Irian Barat pada waktu penyerahan kedaulatan itu akan masuk menjadi bagian Republik Indonesia Serikat atau tidak. Dan Delegasi Negara Indonesia Timur pada permusyawaratan Konperensi Meja Bundar telah memperjuangkan hal ini sampai terakhir serta tetap mempunyai pendirian, bahwa kesatuan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Daripada soal Irian Barat tetap menjadi suatu perselisihan dan sengketa, maka ini harus disesalkan, oleh karena **perselisihan yang sedemikian dapat dan mungkin akan** mengurangi perasaan persahabatan dan kerja sama antara Kerajaan Belanda dan Republik

Indonesia Serikat dalam rangka Piagam Uni¹⁴.

Dengan jawaban pemerintah tersebut, sudah jelas bahwa tindakan pertama yang harus dilakukan ialah berusaha agar Irian Barat tetap menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Sehingga diharapkan kelak kedudukan Irian Barat dalam wadah Negara Republik Indonesia Serikat akan diatur dan merupakan keputusan dan tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Dalam hal ini tentunya Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan berhubungan dengan segala golongan yang bersangkutan serta mempelajari terlebih dahulu dengan teliti perkembangan ketatanegaraan NIT¹⁵. Sehingga tujuan pemerintah Negara Indonesia Timur adalah mendorong secepat mungkin akan menyelesaikan kasus Papua sesuai dengan kehendak seluruh bangsa Indonesia.

Mengenai masalah Irian Barat yang telah mendapat

pengesahan dalam Konperensi Meja Bundar. Maka dalam konferensi Denpasar ini anggota parlemen membahas untuk memasukan naskah tersebut ke rencana Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Pada kesempatan itu Zainal A. Alting mengajukan permohonan agar diberi kesempatan untuk mengajukan penjelasan tentang sikapnya (*stern motiuering*) mengenai tidak dimasukkannya Papua dalam KMB. Sebagaimana diberitakan koran Negara Baru. Zainal A. Alting menyampaikan kekecewaanya.

”Paduka Tuan Ketua yang Utama, Saya selaku Kepala Kerajaan Tidore dengan banyak penyesalan tidak dapat menyetujui hasil-hasil Konperensi Meja Bundar karena dengan hasil tersebut kerajaan saya, walaupun untuk sementara waktu telah dipisahkan, yaitu satu bagian masuk dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat dan lain bagian ialah Irian Barat termasuk di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Pada akhirnya saya kemukakan, bahwa

¹⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, op.cit, hlm. 152.

¹⁵ Imam Toto K. Rahardjo (ed), Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno. (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm, 84.

dalam keterangan yang pendek ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa Kerajaan Tidore tetap mempertahankan haknya atas bagian Irian yang menurut sejarah termasuk dalam lingkungan kerajaan Tidore. Sekianlah. Terima kasih¹⁶”.

Mengenai pembahasan hasil persetujuan Konperensi Meja Bundar dan Rencana Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, maka dilangsungkan pemungutan suara untuk mensyahkan Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Pemungutan suara dilakukan sebanyak 50 anggota senat. Dari 50 peserta, sebanyak 49 orang memberi suara setuju dan satu suara tidak setuju, yaitu anggota Zainal A. Alting. Dengan ini dinyatakan oleh ketua parlemen bahwa naskah tersebut diatas disetujui oleh parlemen¹⁷.

Dengan pernyataan ketua bahwa Badan Perwakilan Sementara Negara Indonesia Timur telah menyetujui naskah

tersebut sehingga dengan ini persetujuan-persetujuan Konperensi Meja Bundar dan Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sudah disyahkan. Dengan diterimanya hasil KMB oleh anggota senat NIT, maka berakhir pulalah perjuangan dan harapan Zainal Abidin memperjuangkan Papua kedalam kewadah Negara Indonesia Timur¹⁸.

Penolakan atas pemisahan Papua dari Negara Indonesia Timur bukan hanya berasal dari Zainal Abidin Alting. Sebagaimana di beritakan surat kabar Indonesia Timoer bahwa Raja-raja Papua seperti raja Ahmad-Uswanas, (Fak-Fak) dan Haji Ibrahim Baoe, (Rumbati/Kokas) telah majukan surat permohonan kepada Paduka Yang Mulia Menteri Dalam Negeri dari Negara Indonesia Timur, supaya Papua digabung di dalam Negara Indonesia Timur. Dalam surat permohonan itu kedua raja tersebut mengatakan bahwa:

“Kami telah mengakui pembentukan Negara Indonesia Serikat, yang

¹⁶ Negara Baroe. (Makasar, 1 Januari 1947)

¹⁷ Negara Baroe. (Makasar, 3 Januari 1947)

¹⁸ Indonesia Timoer. (Makasar, 3 Januari 1947)

terdiri dari Sabang sampai ke pulau Aru, dan sebagai putra bangsa kami hendak mencari perhubungan dan pertolongan dari pemerintah Negara Indonesia Serikat umumnya dan Negara Indonesia Timur khususnya, untuk member bantuan yang seluas-luasnya kepada kami, agar dengan segera kami dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara setanah air. Meskipun dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat menurut Perjanjian Linggarjati, pada tanggal 15 November 1946, dengan mengecualikan Papua, akan tetapi kami selalu tetap menghendaki dengan segala pikiran dan tenaga untuk bersatu padu dengan saudara-saudara sebangsa dalam Negara Indonesia Serikat. Maksud kami ini keluar dari lubuk hati yang bening dan bersih oleh karena itu besarlah harapan kami agar

Paduka Yang menerima persaudaraan kepada kami dan dari sana kita berdiri bersama-sama membangun satu Indonesia yang makmur dan mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dikemudian hari”¹⁹.

Selain penolakan berasal dari raja-raja Papua, penolakan yang sama berasal dari rakyat Maluku. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Soeara Ambon, bahwa dalam rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Persatuan Pemuda Indonesia yang diadakan pada tanggal 13 November di kota Ambon dan dihadiri oleh lebih kurang 3000 orang telah mengambil resolusi sbb:

- a) Terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan tanah air Indonesia seluruhnya serta menyokong pemerintah NIT sesuai dengan putusan Dewan Maluku

¹⁹ Bagian terbesar dari uraian diatas dikutip dalam Indonesia Timoer (Makasar, 24 Januari 1948)

b) Menuntut, serta memperjuangkan Irian tetap dalam RIS²⁰.

Rapat raksasa yang mengambil resolusi tersebut disokong oleh partai-partai dan organisasi-organisasi yang ada di Maluku, antara lain Partai Indonesia Merdeka, Partai Maluku Raya, gerakan Rakyat Nusa Ina, PARDAFI dari Maluku Selatan, perkumpulan kaum Buruh Maluku, Haven Arbeiders organisasi dan lain-lain²¹.

Hal yang sama juga dikemukakan Wakil Ketua Parlemen NIT, Arnold Mononutu²² bahwa masalah Papua harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia (Republik dan RIS), dan bagi NIT merupakan harga mati mengingat pembangunan negara di masa datang. Masalah Papua harus menjadi agenda utama dalam program kerja-kerja partai di parlemen NIT dan juga pemerintah NIT sendiri sehingga setahun dalam kepemimpinannya

dapat diwujudkan²³. Dengan demikian mengenai masalah Papua terdapat kesepakatan antara tokoh-tokoh Federalis dan Republik sebagaimana dalam persetujuan KMB untuk mewujudkan kedaulatan RIS dan berharap antara Republik dan NIT akan terjadi kerjasama yang erat dalam usaha pembebasan Irian.

Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, terbentuklah negara baru yang dinamakan Negara Indonesia Timur dalam wadah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku. Negara Indonesia Timur terbagi menjadi 13 daerah otonomi: yaitu; Daerah Sulawesi Selatan, Daerah Minahasa, Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Sulawesi Tengah, Daerah Bali, Daerah Lombok, Daerah Sumbawa, Daerah Flores, Daerah Sumba, Daerah Timor dan kepulauan, Daerah Maluku Selatan dan Daerah Maluku Utara²⁴.

²⁰ Soeara Ambon. (Ambon, 13 November 1947)

²¹ Menara Merdeka. (Ternate, 24 November 1949)

²² R. Nalanan, op, cit, hlm 277.

²³ Soeloeh Rakyat. (Makasar, 10 Nopember 1949)

²⁴ Menurut hasil Konferensi Denpasar, wilayah Negara Indonesia Timur meliputi Karesidenan berikut, seperti termaktub dalam Staatsblad 1938 nomor 68 jo Staatsblad nomor 264, kecuali Irian Barat, yang akan

Zainal Abidin Alting Gubernur Pertama Papua

Setelah bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS), Zainal Abidin Alting diundang oleh pihak Belanda kepadanya ditawarkan tiga opsi yaitu; (1) Papua bersama Tidore menjadi negara merdeka. (2). Papua bersama Tidore berdaulat di bawah Kerajaan Belanda, dan (3). Papua bersama Tidore menyatu dengan NKRI. Dari ketiga opsi tersebut Zainal Abidin Alting memilih opsi ketiga, dengan sikap politik itulah dikemudian hari Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Gubernur Papua ada tahun 1965-1961, dan Soa-Sio Tidore sebagai ibukotanya²⁵.

BPresiden Soekarno kemudian meminta residen Zainal Abidin (1951-1957) yang juga adalah sultan Tidore untuk dapat membantu pemerintah pusat untuk mengklaim Papua adalah bagian dari Tidore dalam

ditetapkan kemudian hari. Karesidenan Sulawesi Selatan, Karesidenan Sulawesi Utara, Karesidenan Bali, Karesidenan Lombok dan Karesidenan Maluku. Lihat John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

²⁵ Presiden Soekano meminta residen Zainal Abidin Alting (Sultan Tidore) untuk membantu pemerintah pusat RI lewat klaim berdasarkan sejarah.

pespektif sejarah. Usulan tersebut disambut baik oleh Zainal Abidin dengan menawarkan soa-sio Tidore sebagai ibukota provinsi perjuangan Irian Barat.

BPada tanggal 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu Tidore, dengan gubernur pertamanya Zainal Abidin Alting yang dilantik pada 23 September 1956. Zainal Abidin Syah menjadi gubernur Papua pertama 1956-1961, dan selama periode tersebut salah satu kebijakan Presiden Soekarno adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua dengan Indonesia. Maka pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora (tiga komando rakyat) yang terdiri atas; (1), gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda, (2) Kibarkan sang saka di seluruh Irian Barat, dan (3), bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan kesatuan tanah air Indonesia²⁶.

²⁶ Wawan H. Purwanto, *Papua 100 Tahun ke Depan*, (Jakarta: CMB Press, 2010), hlm, 46.

Penutup

Pada akhirnya apa yang di perjuangannya Zainal Abidin dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat bukan hanya semata-mata motivasi politik dan historis melainkan sebagai tanggungjawab seorang pemimpin untuk berjuang membebaskan rakyatnya (Papua) yang dibelenggu oleh penjajah Belanda.

Sebagai sebuah realitas sejarah Zainal Abidin Alting memiliki peran besar untuk mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Pepera mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, karena merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia dalam merebut Irian Barat tidak melalui konfrontasi atau tindakan aneksasi/penjajahan kepada bangsa lain melainkan mendapat dukungan dari masyarakat Irian Barat.

Daftar Pustaka

A. Terbitan Resmi, dan Koran

ANRI, Memori van Overgave Residen Ternate Niewennijs (1867-1869).

ANRI Mvo Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo Seri 2, rel nomer 26.

ANRI, Memori van Overgave, Residen Ternate K.A. James, 1920, (Mailrapport N0.209/19.

Ambon Baru, Ambon, 8 Nopember 1965.

Angkatan Bersendjata, Jakarta, 23 Desember 1969.

Berita Maluku, Ambon, 2 Nopember 1955.

Indonesia Timoer: Makasar, 7 Pebruari. 1 dan 27 Desember 1947.

Indonesia Timoer: Makasar, 24 Januari. 28 Pebruari. 24 Mei. 22 Juni. 18 dan 22 Desember 1948.

B. Buku dan Artikel

Abdullah, Muchdar. 2006. Kesultanan Ternate Dalam Ranah Politik. Tesis S2 Ilmu Politik, UGM.

Agung, Ide Anak Agung Gde. 1985. *Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada.

Alua, Agus A. 2006. *Papua Barat Dari Pangkuan ke Pangkuan. Suatu Ikhtisar Kronologis*. Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

- Andaya, Leonard Y. 1993. *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Antoh, Demmy. 2007. *Rekonstruksi dan Transformasi Nasionalisme Papua*. Jakarta: Sinar Harapan, 2007.
- Bloch, Marc. 1981. *Kaum bangsawan Selaku kelas Menurut Kenyataan, dalam Sartono (ed.) Elite Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djafaar, Irza Arnita. 2005. *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. Jakarta: Bio Pustaka.
- Duverger, Maurice. 1982. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanif, Hasrul. 2008. *Mengembalikan Daulat Warga Pesisir: Partisipasi, Representasi dan Demokrasi di Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jangam, R. T., 1982. *Textbook of Political Sociology*. New Delhi Bombay: Oxford dan IBH Publishing Co.
- Kartodirdjo, Sartono. 1981. *Elite Dalam perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peran Elit Penentu Dalam Masyarakat Moderen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Naymond, Kavin. 2003. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Arise.
- Nurhasim, Moch., et al., 2003. *Konflik Antar Elit Politik Lokal*

- Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah.* Jakarta: LIPI.
- Pigay, Decki Natalis. 2000. *BIK, Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua. Sebelum Saat dan Sesudah Integrasi.* Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Soltau, Roger F. 1991. *The Study Of Politik. (Terjemahan Daniel Dhakide).* Jakarta: Rajawali.
- Syamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.
- Varma, S. P. 1987. *Teori Politik Modern.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Yoman, Socratez Sofyan. 2002. *Pepera 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis.* Jayapura: Lerhamkot.